

**DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PUNIA KARANG
KATENG KELURAHAN PUNIA KECAMATAN MATARAM**

Raudatul Ratna Wati¹, Prayitno Basuki², Irwan Suriadi³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Mataram

Email: raudatulratna01@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan program bantuan yang diberikan sebagai reaksi atas meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang pemerintah yang berupa bantuan uang tunai dalam rangka membantu masyarakat yang tergolong miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dan dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program BLT BBM yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat penerimanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan BLT BBM ini digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari oleh para penerimanya, dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan pembagiannya yaitu untuk membantu masyarakat dalam menjaga daya beli di balik dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram tidak berdampak secara langsung karena nominal yang diterima tergolong kecil sehingga hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kesejahteraan, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan ekonomi yang harus segera diatasi. Kemiskinan memiliki dampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang unggul, menciptakan bantuan sosial ekonomi, meningkatkan kriminalitas dan menurunkan ketertiban umum. Pemerintah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah prioritas karena memiliki dampak negatif dengan dimensi yang luas. Menurut Septiadi (2020) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan konsumsi untuk jenis makanan dan non-makanan. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik

(BPS) Kota Mataram, angka penduduk miskin di Kota Mataram mengalami fluktuasi.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Di samping itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. (BPS, 2004).

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2017 – 2021

Data Kemiskinan	Data Kemiskinan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Miskin (Jiwa)	44.529	42.600	43.190	41.800	44.450
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,55	8,96	8,92	8,47	8,65
Garis Kemiskinan (Rp)	428.754	457.950	480.304	499.959	524.762

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram (diolah)

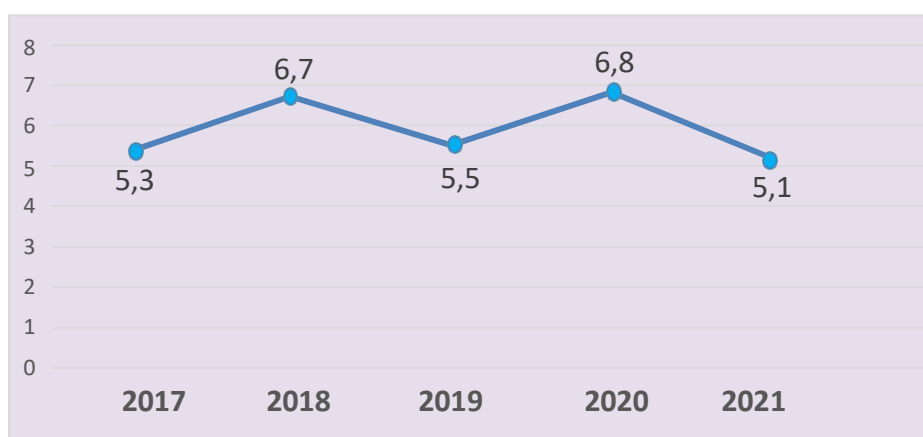
Berdasarkan Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram (Tabel 1.1) di atas, angka penduduk miskin di Kota Mataram mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 dengan persentase penurunan sebesar 0,59%. Sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan angka kemiskinan dengan persentase kenaikan sebesar 0,4%. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 0,45%. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan angka kemiskinan dengan persentase kenaikan sebesar 0,18.

Salah satu penyebab kemiskinan yaitu tingkat pengangguran yang menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerjanya, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap (BPS Kota Mataram dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat, 2022).

Salah satu perhitungan yang digunakan dalam mengukur besarnya potensi angkatan kerja

yang belum tersalurkan atau belum memiliki pekerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi pada suatu daerah akan menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram (Gambar 1.1), menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram cukup fluktuatif.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram 2017-2021



Sumber: BPS Kota Mataram (diolah)

Berdasarkan data di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram menunjukkan fluktuatif karena dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, akan tetapi tingkat pengangguran menunjukkan sebaliknya yang dimana hal tersebut mengartikan bahwa tetap saja masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Penerima dari bantuan ini adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berupa pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka membantu masyarakat yang tergolong miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai penanggulangan kemiskinan dalam pemecahan masalah masyarakat secara luas dan upaya dalam mempertahankan konsumsi rumah tangga. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan serta tanggung jawab sosial dapat ditingkatkan (Maun, 2020).

Terdapat beberapa jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga sasaran (RTS) yakni rumah tangga

yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Program yang diluncurkan pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Tujuan dari program BLT bagi RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama (Choiriyah, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Mataram, berikut rekapitulasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM
Kecamatan Mataram Tahun 2022**

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima BLT
1	Mataram Timur	120
2	Pejanggik	119
3	Punia	118
4	Pagesangan	208
5	Pagesangan Barat	152
6	Pagesangan Timur	288
7	Pagutan	218
8	Pagutan Barat	187
9	Pagutan Timur	133
JUMLAH		1543

Sumber: Kantor Camat Mataram(diolah)

Berdasarkan data tersebut, Kelurahan Punia merupakan penerima BLT BBM terendah dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram. Memandang pada akibat dari kebijakan BLT yang diberikan, kebijakan BLT tidak berdampak secara efektif terhadap situasi masyarakat miskin di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh nominal yang diberikan tidak seimbang dengan eskalasi kebutuhan hidup yang ditanggung masyarakat miskin terhadap dampak atas kenaikan harga BBM yang tentunya berdampak terhadap kenaikan harga berbagai macam kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam istilah umum, kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kondisi yang baik, kondisi dimana orang-orangnya dalam kondisi makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

dijelaskan bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial masyarakat supaya dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), indikator yang digunakan dalam mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah adalah pencetus sekaligus pengawas dari kebijakan yang dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia khususnya pada pembukaan dan Pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan juga UU No. 11 Tahun 2009 terkait kesejahteraan sosial yang menjamin bahwa negara akan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, terlebih lagi mereka yang terlantar dan miskin.

Kemiskinan

Chambers menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependance*) dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya berbicara tentang kekurangan uang dan pendapatan yang rendah. Tetapi juga kemiskinan berkaitan dengan tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak criminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidup sendiri.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan seolah-olah tidak dapat ditangani secara serius padahal pemerintah sudah berupaya dalam membuat berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kemiskinan ini tentu saja memiliki dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemiskinan memiliki dampak bagi penyandanginya, yang di mana beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya yaitu pengangguran, kriminalitas, putusanya sekolah, Kesehatan dan buruknya generasi penerus.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa "Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial". Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Untuk melaksanakan kedua jenis

kegiatan itu disebut bongkar-muat baik melalui gudang/lapangan atau langsung. Untuk melayani bongkar muat barang, pelabuhan menyediakan fasilitas berupa dermaga, gudang, lapangan, jalan, dan lain-lain.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk tunai yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari perlindungan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Tidak lain tujuan dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sampai tahun 2022, jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah yaitu BLT BBM, BLT subsidi upah, BLT dana desa dan BLT UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Desain penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif, sesuai dengan tujuan awal penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram, dimana tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi secara faktual, sistematis dan akurat tentang fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusions drawing/verifying*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Punia Karang Kateng merupakan salah satu lingkungan yang ada di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Lingkungan Punia Karang Kateng merupakan salah satu dari 5 lingkungan yang ada di Kelurahan Punia. Lingkungan Punia Karang Kateng memiliki luas wilayah seluas 87,52 Ha/m². Mata pencaharian penduduk Lingkungan Punia Karang Kateng didominasi oleh buruh harian lepas, karyawan swasta, pedagang, PNS, perdagangan dan wiraswasta.

Banyak kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berorientasi

kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat miskin, salah satunya yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kebijakan yang sudah diberikan masih belum optimal dampak yang dirasakan oleh masyarakat kecil.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM

1) Sejarah Singkat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Punia

Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan kepada masyarakat, tergantung pada produk atau urgensi dari disalurnkannya bantuan tersebut. Akan tetapi, apapun jenisnya pada intinya tujuan dari disalurnkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yang tergolong pra sejahtera.

2) Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM

Disampaikan oleh Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini, Kementerian Sosial mulai 1 September telah memberikan BLT BBM kepada masyarakat. Nominal yang diterima oleh masyarakat yaitu sebesar Rp600 ribu atau Rp150 ribu/bulan yang disalurkan sebanyak 2 kali, tahap 1 pada bulan September sebesar Rp300 ribu dan tahap 2 pada bulan Desember sejumlah Rp300 ribu. Berdasarkan rekapitulasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Punia yang berjumlah 118 KK, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Lingkungan Punia Karang Kateng berjumlah 52 KK.

3) Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram

Setelah turun ke lapangan dalam melakukan penelitian di lokasi penelitian, penerima dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini yaitu yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dimana program ini juga termasuk salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara bersyarat. Untuk data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima BLT BBM ini secara langsung mengambil uang yang didapat melalui Kantor Pos atau PT Pos Indonesia.

4) Pemanfaatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa melalui bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, masyarakat penerimanya merasa sangat terbantu meskipun nominal yang diberikan tergolong kecil. Akan tetapi, para penerima bantuan tersebut menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di samping itu, berdasarkan hasil

wawancara, ketujuh informan utama serentak menjawab bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya BLT BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka.

5) Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram

Dari ketujuh indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, peneliti menggunakan salah satu di antaranya yaitu tingkat konsumsi dan pengeluaran yang dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan disalurkaninya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini. Oleh karena itu, apabila kita melihat dari angka konsumsi dan pengeluaran masyarakat penerima BLT BBM ini, kesejahteraan para penerima berdasarkan indikator tingkat konsumsi dan pengeluaran berada di tingkat sedang karena mereka memiliki angka konsumsi dan pengeluaran dengan kisaran Rp1.000.000 - Rp5.000.000, itu artinya mereka berada dalam tingkat sedang.

Pembahasan

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM

Sesuai dengan penelitian Tumbel, dkk (2021) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga BBM. Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk jumlah penerima BLT BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram yaitu sebanyak 52 KK. Dalam menyampaikan penerima BLT BBM, disampaikan langsung oleh Pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk pengambilan BLT BBM ini, diambil langsung oleh penerimanya di Kantor Pos dengan syarat membawa fotokopi berkas-berkas yang harus dibawa.

2. Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, para penerima BLT BBM menggunakan uang yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, mereka juga mempergunakan uang didapatkan untuk kebutuhan pribadi dan pendidikan anak mereka. Pada dasarnya, salah satu tujuan pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat di balik kebijakan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga, yang tentu saja hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat. Sesuai dengan penelitian Ilhamdatun (2021) Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program tersebut membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin

dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak masih tinggi dibandingkan dana yang diterima masyarakat dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram

Dalam penelitian ini, akan melihat bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng. Kesejahteraan masyarakat tentunya memiliki tolak ukur tersendiri, di antaranya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari hasil wawancara, para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, mereka menggunakan uang yang didapatkan untuk kebutuhan anak sekolah sehingga dapat dikatakan bahwa uang tersebut mengambil andil dalam pelaksanaan pendidikan juga. Melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat menggunakannya untuk memenuhi konsumsi mereka sehingga daya beli masyarakat juga terbilang terjaga dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang disalurkan pemerintah dapat membantu masyarakat Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, akan tetapi BLT BBM tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Selain jumlahnya yang kecil, periode pemberian bantuan ini juga terbilang hanya sebentar, dimana BLT BBM ini memang diberikan oleh pemerintah dalam waktu jangka pendek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang mendalam, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang disalurkan kepada masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram yang terdampak atas kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh pengurangan subsidi pada BBM dapat disimpulkan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program ini. Dengan adanya program ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM oleh masyarakat Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram yakni digunakan oleh para penerimanya dalam membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan juga keperluan lain untuk konsumsi, selain itu juga digunakan untuk keperluan sekolah anak mereka sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan uang yang didapatkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diberikan oleh pemerintah ini sejalan dengan

tujuan pembagiannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin dan juga menjaga daya beli mereka di balik dampak kebijakan kenaikan harga BBM.

3. Meskipun bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang disalurkan pemerintah dapat membantu masyarakat Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, akan tetapi BLT BBM tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Selain jumlahnya yang kecil, periode pemberian bantuan ini juga terbilang hanya sebentar, dimana BLT BBM ini memang diberikan oleh pemerintah dalam waktu jangka pendek.

Saran

1. Bagi pihak pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan agar berperan lebih aktif lagi dalam menyampaikan sosialisasi terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat juga mengetahui bantuan apa saja yang mereka dapatkan dari pemerintah
2. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, disarankan untuk melakukan pengkajian ulang terkait jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan, mengingat jumlahnya yang dinilai kecil. Selain itu, mengingat bahwa BLT tidak memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, penulis menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang dalam mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas program Bantuan Langsung Tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Azhar, and Timbul Dompok. 2020. "Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)." *Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam* 5.1 : 43-49.
- Afifi, M. (2011). Kontribusi Kesalehan Ritual dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku Merusak Ekosistem Terumbu Karang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 11(2), 135-151.
- Arifin, D., Harahap, G., & Saleh, K. S. (2019). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara). *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.31289/jiperta.v1i1.75>
- Bimrew Sendekie Belay. 2022. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ladungsari Kota Malang. 8.5.2017, 2003–2005.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harwidiansyah. 2011. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Dakwa dan

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Hasan, Dalil. 1996. Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta. PT. Bineka Rena Pariwisata.
- Hassan, A., Maharoff, M., Abiddin, N. Z., & Ro'is, I. (2015). Teacher trainers' and trainee teachers' understanding towards the curriculum philosophy regarding soft skills embedment in the Malaysian Institute of Teacher Education. *Policy Futures in Education*, 14(2), 164-175.
- Ilhamdatul, L. 2019. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.
- Itang. 2015. Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katadata. 2022. Angka Kemiskinan Indonesia Maret 2022 Terendah Semenjak Pandemi. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi>
- Kemenkeu.go.id. 2022. Untuk Melindungi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, Pemerintah Alokasikan Dana BLT BBM Rp24,17 Triliun. URL: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BLT-BBM>
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Derah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maryam, S. T., Atamimi, R., Sumartono, E., Orbaningsih, D., & Riinawati, R. (2020). Global financial crisis management by human resource management. *Journal of Critical Reviews*, 7(1), 287-290.
- Marliati, D., Herlina, V., & Eliyanti, S. 2021. Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *JAN Maha*, 3(10), 117–126.
- Mataram, B. P. S. K. 2022. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2022*.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. 2021. Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi JPENSI*, 6(3), 263. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Perdana, W., Purwati, A. S., & Sarmilasari, M. 2022. Analisis Efektivitas Dan Dampak Bantuan Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten. 1101–1114.
- Rahmawati, Y., Abiddin, N. Z., & Ro, I. (2015). Relationship between motivation and organizational commitment among scout volunteers In East Kalimantan. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 51-63.
- Rosifah, S. N., Nuryakin, C., & Handalusia, V. (2019). Islamic Precepts For Marital Happiness In Indonesia: The Role Of Religiosity And Spouse's Characteristics. *International Journal of Business & Society*, 20.

- Sarbi, S., Zulmaizar, M., & Mandar, A. A. 2021. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. 1.
- Selviana. 2016. Bantuan Langsung Tunai Selviana. *Equilibrium pendidikan sosiologi*, IV(1), 1–10.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika
- Sulaiman, M. Y. 2021. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5*. Jakarta. PT. Bina Rena Pariwisata.
- Syekh Nurjati, "Peranan Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam", *AL – Anwal*,no. 2, vol 10,(2018), hal 217-221. 9
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 2009. Indonesia: Departemen Sosial, Republik Indonesia.
- Tempo.co. 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 5,86 Persen. URL: <https://data.tempo.co/read/1558/tingkat-pengangguran-terbuka-agustus-2022-586-persen>
- Tri, Hendarti. 2020. Efektivitas Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai dan Bansos APBD Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Jeruk. 0717, 50–60.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. 2021. Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*,iii(110), 79–92.